

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor pemerintah bisa kita lihat dari Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Telah menjadi pembicaraan luas, auditing merupakan suatu investigasi independent terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau investasi pengelola aset negara lainnya. Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan criteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang di nilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Bentuk jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Audit Pemerintah (SAP) yang kini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dilingkungan pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan

instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan audit, yang berdampak pada kerugian negara. Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007), (*Good Governance*) adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyusun pertanggung jawaban keuangan negara. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (PEMDA) (Rambe, 2015).

Pemeriksaan (audit) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional dengan tujuan untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya reformasi dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan/inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya fakta-fakta yang terungkap tentang kinerja pemerintah yang bisa dinilai kurang memuaskan, mulai dari pengungkapan kasus-kasus korupsi hingga pelanggaran yang diluar batas wajar, membuat tuntutan terhadap akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik.

Di Indonesia, audit pemerintah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu audit Inspektorat dan audit BPK. Audit Inspektorat menghasilkan rekomendasi sedangkan audit BPK menghasilkan opini. Undang-Undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menerangkan bahwa BPK merupakan satu-satunya auditor eksternal atas keuangan negara, dan pemeriksa adalah auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Di Rokan Hulu salah satu pengawas keuangan pemerintah adalah Inspektorat. Inspektorat bertindak sebagai auditor internal pemerintah, auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah dimana tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Audit internal adalah salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan aset-aset negara. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian yang dapat terjadi dilingkungan pemerintahan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Pemeriksaan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi

dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan, Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Audit pemerintahan adalah salah satu elemen penting untuk penegakan *good government*. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga independensi, integritas, serta obyektifitas auditor. Kompetensi pengalaman kerja yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas audit yang diberikannya. Penggunaan sampel pada penelitian ini yaitu auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH OBYEKTIFITAS, INTEGRITAS, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT PADA PEGAWAI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HULU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah secara simultan obyektifitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan obyektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Dari Penelitian ini Sebagai Berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, auditor pemerintah provinsi Riau dapat memberikan motivasi dan koreksi dalam peningkatan kinerja serta agar dapat memacu semangat untuk berusaha memperoleh hasil kerja audit yang berkualitas agar bermanfaat untuk pengembangan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bagi dunia akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti pendukung yang dapat memperkuat penelitian-penelitian terdahulu dan dapat pula sebagai acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

Untuk lebih focus maka penelitian ini hanya meneliti pada obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Ayungnityas (2012) yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada Auditor Inspektorat Kabupaten Jawa Tengah).

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan akan dilakukan sesuai dengan uraian pokok dari masing-masing 3 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai obyektifitas, integritas, dan kompetensi dan kualitas hasil audit serta pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi objek penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, pengukuran variabel, metode analisis data yang terdiri dari pengujian kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Hasil Audit

Audit internal merupakan bagian dari suatu organisasi yang integral, yang menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan kontribusi kepada pihak manajemen organisasi dan pemeriksa ekstern. Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi (Rohman, 2007)

Pengertian audit internal menurut standar profesional akuntan publik (SPAP) PSA (pernyataan standar auditing) no. 69 paragraf 6 adalah “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan tentang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini.

Keandalan pelaporan, efektifitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan Pada pemerintahan, auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari inspektorat jendral kementerian, satuan pengawasan intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), inspektorat wilayah kabupaten/kota (itwilkab/itwilkot), dan badan pengawas keuangan dan

pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemeriksa independen auditor eksternal.

Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat quality assurance apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain : standar profesional praktis, internal audit karakter, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja (Pramono (2007)).

Hampir semua definisi mengenai auditor internal memiliki satu kesamaan, yaitu auditor internal sebagai pelayanan independen yang membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan cara mengevaluasi pengendalian manajemen dan mereview informasi, yang bekerja secara bebas tanpa di intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, memperoleh jaminan/kepastian wewenang dan tanggung jawab melalui formalisasi kebijakan dan prosedur audit, serta memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas, catatan dan personil, agar auditor dapat memberikan penilaian yang tidak bias dan menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa.

Selain itu, auditor internal juga dapat memberikan secara langsung dukungan kepada manajer selama pekerjaan audit dilaksanakan, serta pada saat penyelesaian laporan dan ditindak lanjutinya hasil audit.

Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu

perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidak selarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Namun sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai bagaimana dan apa kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas jasa secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, kualitas jasa adalah sebuah konsep yang sulit dipahami dan kabur, sehingga kerap kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas jasa dengan cara yang berbeda-beda.

Pada sektor publik kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau pemeriksa (BPKP) dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah).

Rambe. (2015) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah :

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap

tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai unntuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit

2.1.2.1. Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Mulyadi (2007) mendefenisikan independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan

fakta dan adanya perimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Fungsi pemeriksaan dapat berjalan efektif, pemeriksa harus independen dari aktivitas yang diperiksa. Independensi yang lengkap secara tidak langsung menyatakan kebebasan dari semua dependensi (keterikatan), termasuk dependensi keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan meningkat.

Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor harus melaporkan kepada pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengenai situasi adanya dan atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidak independenan atau biasa. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menggantikan auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut. Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditor seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektifitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut.

Zulfan (2007) menyatakan, independen dalam audit mencakup :

- a. Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup
- b. Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan di audit
- c. Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan mempengaruhi makna laporan serta bebas untuk mengungkapkan fakta.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dalam audit yang sedang dilakukannya (Rambe, 2015):

- a. Faktor Pribadi yang meliputi hubungan pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan audit, hubungan kerja dengan auditan sebelum dan sesudah audit, keberpihakan terhadap golongan, kelompok, organisasi atau program Pemerintahan, kepentingan politik dan sosial tertentu.
- b. Faktor Eksternal meliputi hal-hal yang dapat mengganggu pemeriksa dalam menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan pendapat atau simpulan audit yang objektif. Faktor eksternal ini dapat berasal dari hubungan kelembagaan yang terjadi antara pemeriksa dengan auditan.

2.1.2.2. Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Obyektifitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip obyektifitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Auditor melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya. Setiap auditor harus menjaga obyektifitas dan bebas

dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya (Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Mulyadi, 2007). Dalam prinsip tersebut dinyatakan obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Mulyadi (2007) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan obyektifitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Adakalanya auditor dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektifitasnya.
- b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektifitas.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, pengaruh lainnya untuk melanggar obyektifitas harus dihindari.
- d. Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlihat dalam pemberian jasa professional mempengaruhi prinsip obyektifitas.
- e. Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan

dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka ternoda.

2.1.2.3. Integritas

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Ayuningtyas 2012). Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat :

- a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
- b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, atau
- c. Penghingan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atau informasi yang seharusnya diungkapkan (IAPI, 2009)

Menurut Pusdiklatwas Badan pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP 2005), Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusannya. Sebagai bentuk memiliki kepercayaan publik, integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawan dalam melaksanakan audit.

Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2.1.2.4. Kompetensi

Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekanan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir (Mulyadi, 2007)

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Ayuningtyas 2012). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium.

Standar umum pertama dalam (SPKN 2007) menyatakan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan pernyataan standar ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, mengangkat, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Mulyadi (2007) dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah :

1. Pencapaian kompetensi professional

Pencapaian kompetensi professional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, yang diikuti oleh pendidikan khusus pelatihan dan ujian professional dalam subjek-subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan kompetensi professional

- a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan professional secara berkesinambungan selama kehidupan professional anggota.

- b) Pemeliharaan kompetensi professional memerlukan kesadaran untuk mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Masyarakat mengharapkan akuntan publik melakukan penilaian bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar terhadap pemakai laporan keuangan auditan dan

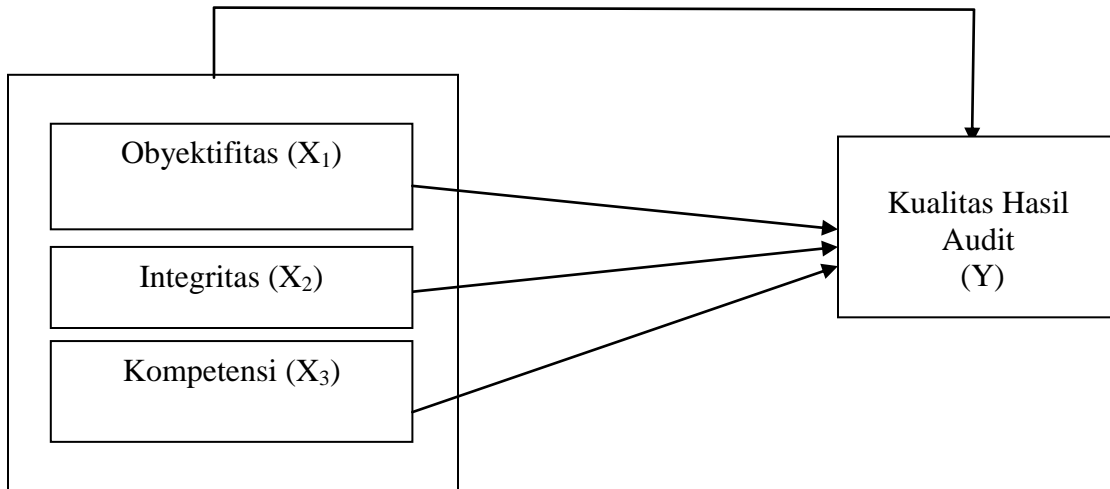
jasa lainnya yang diberikan oleh auditor sehingga mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Sukriah, (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan populasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat sepuluh Lombok dengan teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Variabel independen yang digunakan adalah pengalaman kerja, independensi. Obyektifitas, integritas dan kompetensi sedangkan variabel dependennya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Alim, (2007) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh auditor yang berada diwilayah Jawa Timur dengan teknik pengumpulan sampel adalah *Simple Random Sampling*. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, independensi sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada kualitas audit adalah kompetensi dan independensi.

2.3. Kerangka Penelitian

Berikut ini disajikan rerangka pikir penelitian secara ilustratif mengenai pengaruh obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari telaah pustaka maka hipotesis penelitian yaitu :

- H₁ : Secara simultan obyektifitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit
- H₂ : Obyektifitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit
- H₃ : Integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.
- H₄ : Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit”.

Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kualitas hasil audit internal karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar terwujudnya *good governance dan clean governance*.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian asosiatif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan terikat (Sugiyono, 2010).

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dimana auditor hanya berjumlah 19 orang.

3.4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui kuesioner yang di bagikan kepada responden (Sugiyono 2010).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1) Angket (*Questioner*)

Dalam rangka mendapatkan data primer, maka angket (kuesioner) akan diberikan kepada responden. Dari hasil jawaban diharapkan ditemukan keterkaitan antara variabel yang akan dianalisis. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan dari responden adalah dengan menggunakan skala *Likert*. Skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai yang bertingkat dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 1-5, yaitu: Sangat baik = 5, Baik = 4, Netral = 3, Tidak baik = 2, dan Sangat tidak baik = 1.

3.6. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Variabel penelitian pada penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit auditor dilingkungan pemerintah daerah. Maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

3.6.1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2010) adalah “variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai

hubungan positif maupun variabel bagi variabel dependen lainnya”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Obyektifitas, Integritas, Dan Kompetensi.

1) Obyektifitas (X_1)

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur serta intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

2) Integritas (X_2)

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Auditor dituntut untuk jujur dengan taat peraturan, tidak menambah atau mengurangi fakta dan tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun. Auditor juga harus memiliki sikap berani dan bijaksana dalam tanggung jawab auditor untuk tidak merugikan orang lain, memperbaiki hasil kerjanya, konsisten terhadap pekerjaan serta bersikap sesuai norma dan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.

3) Kompetensi (X_3)

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, jadi semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

3.7.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau terikat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Hasil Audit.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji analisis deskriptif, kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

3.7.1. Analisis Deskriptif Variabel

Uji statistik dasar untuk menentukan deskriptif seperti jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya juga menganalisis variabel penelitian dalam bentuk skor dan presentase, serta nilai rata-rata (Riduwan, 2010. 45).

Tabel 3.1. Teknik Analisis Data Deskriptif

No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban					Rata-rata
		SS	S	C	TS	STS	
1	Bagaimana menurut saudara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....	50	31	4	0	0	4,5

Misalkan dalam contoh ini jumlah respondennya 85 orang, adapun dari jawaban mereka yang terdiri alternatif sebagai berikut :

Sangat setuju (SS) : 50 orang maka skornya $= 5 \times 50 = 250$

Setuju (S) : 31 orang maka skornya	= 4 × 31 = 124
Cukup (C) : 4 orang maka skornya	= 3 × 4 = 12
Tidak Setuju (TS) : 0 orang maka skornya	= 2 × 0 = 0
Sangat Tidak Setuju (STS) : 0 orang maka skornya	= 1 × 0 = 0
Jumlah	386

$$\text{Rata - rata} = \frac{\sum(\text{bobot} \times \text{Jumlah responden})}{n}$$

$$= \frac{386}{85} = 4,5 \text{ (Sangat Baik)}$$

Tabel 3.2. Interval Kategori Rata-rata Skor Terhadap Variabel Penelitian

No	Interval Rata rata	Kategori
1	1,00 – 1,79	Sangat Tidak Baik
2	1,80 – 2,59	Tidak Baik
3	2,60 – 3,39	Cukup
4	3,40 – 4,19	Baik
5	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Olahan dari Sugiyono (2010).

3.7.2 Uji Kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian terhadap kualitas data. Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berkualitas.

3.7.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor signifikan pada tingkat signifikansi 0,03 (Sugiyono, 2010)

3.7.2.2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One Shot, pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,07$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji tingkat kenormalan distribusi variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Adapun analisis yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan metode grafik, yaitu menggunakan grafik normal probability plot. Grafik normal probability plot berfungsi

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2012: 80). Deteksi normalitas dilihat melalui penyebaran data (plot) pada sumbu diagonal, dengan kriteria :

- a.. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Jika variabel *independent* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel sesama variabel *independent* sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Suatu variabel menunjukkan gejala multikolinieritas bisa dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang tinggi pada variabel-variabel bebas, dan dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana sebaran varian faktor atau *disturbance* tidak konstan sepanjang daerah observasi. Adapun metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu Metode Grafik. Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar penentuan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu (plot) yang teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas atau plot menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model bersifat homoskedastis.

3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda. Bertujuan dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independennya.

Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = kualitas hasil audit

α = konstanta

b_1 - b_3 = koefisien variabel independen

X_1 = Obyektifitas

X_2 = integritas

X_3 = kompetensi

e = Sistem erorr

3.7.5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Pengujian regresi secara simultan yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat, menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) ini bernilai antara 0 dengan 1

$(0 \leq R^2 \leq 1)$ untuk mengukur ketepatan garis yang dipandangkan (garis regresi) yang didapati dari X_i dan Y .

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.7.6. Uji Hipotesis

3.7.6.1. Pengujian Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Untuk menentukan uji F tabel tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan, pengujian F-hitung dengan membandingkan derajat kebebasan (dk) F tabel $(\alpha, k, n-k-1)$ dimana $\alpha = 0,05$, $k =$ jumlah variable bebas, dan $n =$ jumlah sampel. Dengan demikian nilai F tabel $(0,05, 3, 15)$ sebesar 3,92

Adapun pembuktian hipotesis yaitu :

- a) Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel pada signifikan $\alpha = 5\%$
- b) F hitung $>$ F tabel, maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- c) Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel pada signifikan $\alpha = 5\%$
- d) F hitung $<$ F tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7.6.2. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas /independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Melihat t tabel dapat dicari dari $(dk) = n - k - 1$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen/bebas pada tingkat signifikansi 5%, maka t tabel sebesar 1,753 (Ghozali, 2013).

Adapun pembuktian hipotesis

- a) Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel pada signifikan $\alpha = 5\%$
- b) $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, terdapat pengaruh secara signifikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- c) Apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel pada signifikan $\alpha = 5\%$
- d) $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, tidak terdapat pengaruh secara signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak